

Peran Surat Kabar Bendera Islam Dalam Perjuangan Khilafah 1924-1927

Septian Anto Waginugroho¹

¹Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Article Info

Article History
Submitted 18-07-2022
Accepted 29-12-2022
Published 07-01-2023

Keywords:

Newspaper,
Bendera Islam,
Chalipate,
Sarekat Islam,
Indonesia

Correspondence:
septian.shum@gmail.com
il.com

Abstract

The aim of this study was to investigate the role of Bendera Islam newspaper in the Caliphate movement from 1924 to 1927. The current study was conducted by using a historical approach in four stages: searching of historical sources (heuristics), critics, interpretation, and historical writing (historiography). Bendera Islam was a newspaper in Melayu language published by an Islamic organization movement in Hindia Belanda (Indonesia) called Sarekat Islam. At that time, newspaper publishing was a well-known method used by organizational movements to socialize their thoughts to the public. Bendera Islam had been published since 1924 until 1927, along with the period in which Sarekat Islam involved in the Caliphate movement. Therefore, many articles written by Sarekat Islam activists were found in Bendera Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan peran surat kabar Bendera Islam dalam perjuangan khilafah tahun 1924 hingga 1927. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode historis yakni melalui empat tahap: mencari sumber sejarah (heuristik), kritik, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi). Bendera Islam adalah surat kabar berbahasa melayu yang diterbitkan oleh salah satu organisasi pergerakan umat Islam di Hindia Belanda (Indonesia), yakni Sarekat Islam. Saat itu penerbitan surat kabar merupakan cara yang biasa dilakukan oleh organisasi pergerakan untuk menyosialisasikan pergerakan mereka kepada masyarakat. Bendera Islam terbit sejak 1924 hingga 1927, bersamaan dengan periode Sarekat Islam terlibat dalam perjuangan khilafah. Oleh karena itu dalam Bendera Islam ditemukan ada banyak tulisan mengenai perjuangan khilafah yang ditulis oleh para penggerak Sarekat Islam.

A. PENDAHULUAN

Wacana perjuangan khilafah dewasa ini menarik untuk disimak karena mendapatkan beragam respon dari masyarakat Indonesia. Menurut masyarakat yang mendukung, perjuangan ini baik karena bertujuan mendirikan sebuah pemerintahan Islam (khilafah) yang menyatukan umat Islam di seluruh belahan dunia dalam satu peraturan hidup yang Islami. Bagi kalangan yang lain, perjuangan ini dianggap sebagai ancaman bagi kedaulatan NKRI (Abdurrahman Wahid, 2009: 35). Terlepas dari

pandangan pro dan kontra masyarakat, perjuangan khilafah pada dasarnya bukanlah hal yang baru untuk masyarakat Indonesia. Perjuangan ini pernah ada di Indonesia pada tahun 1920-an, jauh sebelum konsep NKRI lahir. Oleh sebab itu, di tengah banyak masyarakat yang sedang banyak membicarakannya maka menjadi hal yang menarik jika menelusuri kembali jejak-jejak perjuangan khilafah pada masa lalu. Sekaligus hal itu menjadi cara untuk menambah wawasan mengenai dinamika perjuangan ini di Indonesia.

Umat Islam di Indonesia telah tertarik pada perjuangan khilafah sejak Perang Dunia I berakhir. Pada saat itu Turki Usmani yang oleh mereka dipandang sebagai perwujudan Khilafah Islamiyah sedang mengalami kegoncangan. Negara yang pada masa sebelumnya pernah ditakuti dunia Barat ini menjadi pihak yang kalah dalam Perang Dunia I dengan keadaan yang lemah, miskin, dan ekonomi yang nyaris bangkrut ditambah banyaknya wilayah kekuasaannya yang lepas. Dalam situasi pemerintahan yang lemah dan kacau ini, muncul Mustafa Kemal Pasha dari golongan nasionalis dalam panggung politik Turki yang mengubah struktur pemerintahan dari sistem khilafah menjadi republik (Erik J. Zürcher, 2003: 215-216). Meskipun begitu jabatan khalifah tetap dipertahankan dengan tanpa kekuasaan duniawi. Namun pada perkembangannya, khalifah saat itu, Abdul Majid, memiliki pengaruh yang kuat sehingga muncul dua kekuasaan dalam satu negara. Oleh sebab itu, pada 3 Maret 1924, melalui Majelis Nasional Turki, Mustafa secara menyeluruh menghapuskan Kekhilafahan Turki Usmani (Ahmad Syukri, 2007: 73-74).

Perkembangan ini menimbulkan kebingungan pada dunia Islam yang mulai berfikir tentang pembentukan sebuah khilafah yang baru. Saat itu umat Islam di Indonesia tidak hanya berminat pada masalah ini bahkan merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya (Deliar Noer, 1996: 242). Kenyataan ini tidak terlepas dari pengaruh PanIslamisme di Indonesia. Menurut Aqib Suminto, ada hubungan yang erat antara Pan-Islamisme dan jabatan khalifah. Pan-Islamisme adalah paham yang memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seorang khalifah. Oleh sebab itu maka saat jabatan khalifah ini dihapuskan, ada banyak umat Islam yang merespon dan memperjuangkannya agar tegak kembali (Aqib Suminto, 1996: 80-83).

Sarekat Islam adalah salah satu kelompok umat Islam Indonesia yang terlibat dalam perjuangan khilafah. Mereka memiliki peran yang paling dominan dibandingkan dengan yang lain. Organisasi yang menjadi inspirator Kongres Al-Islam (sebuah

kongres yang mempertemukan wakil-wakil kelompok Islam di Indonesia) ini tampil sebagai pelopor perjuangan khilafah di Indonesia (Martin van Bruinessen, 1995). Sikap mereka tersebut sejalan dengan menguatnya loyalitas mereka terhadap Pan-Islamisme. Saat itu mereka mengklaim diri sebagai pejuang Pan-Islamisme di Indonesia (Bandera Islam, 1924).

Antusiasme mereka untuk perjuangan khilafah dideklarasikan dalam Kongres Nasional Sarekat Islam ke-11 pada Agustus 1924. Kongres ini juga menyepakati akan menerbitkan sebuah surat kabar baru yang diberi nama Bandera Islam. Saat itu usaha penerbitan surat kabar merupakan cara yang biasa dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan untuk menyuarakan azas, tujuan, dan program aksi mereka. Surat kabar berbahasa melayu ini diterbitkan oleh Sarekat Islam untuk menyebarkan ilmu-ilmu keislaman dan pandangan-pandangan politik mereka. Bandera Islam terbit selama tiga tahun sejak 1924 hingga 1927. Periode terbitnya ini berbarengan dengan periode Sarekat Islam memperjuangkan khilafah. Oleh karena itu ditemukan ada banyak tulisan mengenai perjuangan khilafah dalam terbitan Bandera Islam.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang melalui empat langkah, yaitu heuristik, kritik, interpertasi, dan historiografi. Pada langkah heuristik, peneliti mencari sumber-sumber sejarah berupa sumber tertulis baik primer maupun sekunder. Sumber primer berupa surat kabar Bandera Islam yang terbit tahun 1924-1927 dalam bentuk microfilm dan surat kabar lain yang terbit sezaman. Semuanya didapatkan dari koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Untuk melengkapi sumber tersebut digunakan juga sumber sekunder berupa buku dan artikel yang didapatkan dari Perpustakaan FIB UI, Perpustakaan Pusat UI, dan koleksi pribadi. Sumber-sumber tersebut kemudian diteliti dari segi fisik apakah sumber itu asli atau tidak (kritik eksternal) dan dari segi isi (kritik internal) berupa pembacaan sumber secara kritis agar memperoleh fakta sejarahnya. Fakta-fakta yang diperoleh kemudian dikumpulkan, ditafsirkan, disusun secara sistematis dan terakhir dibuatkan narasi (historiografi).

Ruang lingkup penelitian secara spasial adalah peran surat kabar Bandera Islam dalam perjuangan khilafah dan secara temporal sepanjang periode antara 1924, sejak pertama kali Bandera Islam terbit, hingga Bandera Islam berhenti terbit pada 1927.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjuangan Khilafah awal Abad ke-20

Indonesia awal abad ke-20 ditandai dengan kemunculan banyak organisasi pergerakan yang didirikan oleh kaum pribumi. Meskipun kemunculan tersebut untuk tujuan sama yakni memajukan kehidupan kaum pribumi, masing-masing organisasi memiliki identitas dan jalan perjuangan yang berbeda. Sebagian ada yang menempuh jalan kompromi (kooperatif) dengan pemerintah Hindia Belanda dan sebagian besar yang lain memilih jalan radikal (non-kooperatif). Identitas mereka tidak semua sama, secara garis besar mereka terfragmentasi kedalam tiga kelompok: Islam, Sekuler, dan Komunis (Cahya Budi Utomo, 1995).

Di antara organisasi tersebut, organisasi Islam menjadi kelompok yang banyak memberi respon terhadap situasi yang terjadi di Turki. Saat Majelis Nasional Turki menghapus Khilafah Turki Usmani jumlah organisasi Islam di Indonesia sudah banyak, diantaranya ada Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan Sarekat Islam. Umumnya respon mereka adalah kekecewaan atas penghapusan sistem khilafah di Turki sehingga kemudian mereka berupaya untuk terlibat mencari pengganti jabatan khalifah.

Organisasi Islam yang paling menonjol dalam perbincangan masalah khilafah sehingga layak mendapat perhatian lebih adalah Sarekat Islam. Besarnya animo masyarakat Indonesia tentang persoalan khilafah tidak terlepas dari peran sentral organisasi ini. Sarekat Islam didirikan di Solo pada tahun 1912 dan tumbuh dari organisasi yang mendahuluinya, Sarekat Dagang Islam. Pembentukan Sarekat Islam dilatarbelakangi oleh reaksi terhadap kegiatan orang Cina dalam perdagangan batik. Untuk mempertahankan diri terhadap praktek-praktek hebat orang Cina, para pedagang batik Jawa akhirnya bersatu pada tahun 1911 dan mendirikan Sarekat Islam. Organisasi ini segera mengalami perkembangan yang pesat ketika itu dan organisasi inilah yang paling dinamis (A.P.E Korver, 1985:11-14).

Selain kemunculan organisasi-organisasi Islam, pada saat yang bersamaan umat Islam di Indonesia juga dihadapkan pada masalah pertikaian internal sesama mereka. Penyebabnya adalah perbedaan furu'iyah dalam masalah mazhab fikih. Sekalipun umat Islam Indonesia mengakui mazhab apapun, terutama dalam hal fikih, namun sebagian besar umat Islam Indonesia mempraktikkan Mazhab Syafi'i, mazhab yang menjadi identitas yang paling mudah dikenali dari kelompok umat Islam yang dikenal dengan golongan tradisional. Sementara itu kelompok yang lain, yang dikenal dengan golongan pembaharu, datang membawa pemahaman mazhab baru. Pada umumnya

golongan ini banyak mempraktikkan fikih Mazhab Hambali meskipun doktrin yang populer pada golongan ini adalah “tidak bermahzab” dan “kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah”. Perdebatan mengenai keharusan dan ketidakharusan bermahzab inilah yang cukup sering menjadi perbincangan di tokoh golongan tradisional dan pembaharu. Perbedaan pandangan dalam masalah fikih tersebut telah mengakibatkan munculnya blok-blok dalam tubuh umat Islam yang pada saat-saat tertentu berubah menjadi identitas politik. Dengan kata lain masalah ini telah mempolarisasi umat Islam menjadi kelompok tradisional dan pembaharu (Tiar Anwar Bachtiar, 2011: 21-31).

Sehubungan dengan hal di atas, Sarekat Islam kemudian menggagas sebuah pertemuan untuk mengumpulkan pemimpin-pemimpin umat Islam di Indonesia. Pertemuan yang dinamakan Kongres Al-Islam ini bertujuan menyatukan suara dan tenaga umat Islam yang terpisah dalam berbagai macam organisasi dan golongan (Bandera Islam, 8 Januari 1925). Secara keseluruhan sembilan kongres diadakan dalam jarak waktu yang tidak tertentu sejak 1922 hingga 1932. Pada serial kongres ini dibahas berbagai peristiwa dan permasalahan yang menyangkut umat Islam untuk kemudian dicari penyelesaiannya.

Periode penyelenggaraan Kongres Al-Islam ini bertepatan dengan kemunculan permasalahan khilafah. Oleh karena umat Islam di Indonesia memiliki antusiasme yang besar untuk terlibat maka permasalahan ini menjadi topik pembahasan Kongres Al-Islam. Untuk beberapa waktu permasalahan khilafah ini menjadi sebuah “permasalahan bersama” ditengah perbedaan yang ada antara golongan tradisional dan pembaharu.

Tidak membutuhkan waktu lama bagi umat Islam di Indonesia untuk merespon permasalahan khilafah. Dua bulan setelah Turki Usmani runtuh, mereka sudah membahasanya pada Kongres Al-Islam kedua yang diadakan pada 19-21 Mei 1924. Dalam pidato pembukaan kongres, K. H. Agus Salim menegaskan, Kongres Al-Islam ini perlu mencari solusi atas permasalahan khilafah. Bagi Agus Salim keberadaan sebuah pemerintahan Islam yang merdeka adalah suatu hal yang penting (Martin van Bruinessen, 1995: 127).

Sekitar pertengahan 1924 umat Islam di Indonesia menerima undangan Kongres Kairo dari ulama Al-Azhar. Kongres yang akan diadakan pada Maret 1925 itu akan mengumpulkan seluruh perwakilan umat Islam di berbagai belahan dunia untuk memilih khalifah yang baru. Undangan diterima oleh beberapa tokoh Arab dan asosiasi

Arab di Jakarta dan Surabaya. Beberapa penerima mendekati Tjokroaminoto, seorang pemimpin Sarekat Islam, untuk mengirimkan sebuah delegasi dari Indonesia.

Pada 4-5 oktober 1924 para pemimpin Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Al-Irsyad mengadakan sebuah pertemuan di Surabaya untuk menentukan apakah perlu mengirim delegasi. Selain para pemimpin nasional dan lokal dari ketiga organisasi tersebut, pertemuan ini juga banyak dihadiri ulama-ulama besar, baik dari kalangan orang Arab maupun orang Jawa (Martin Van Bruinessen, 1995:128).

Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi yang panjang tentang khilafah dan pengiriman delegasi untuk kongres di Kairo. Tjokroaminoto, dalam pidatonya menyampaikan tentang perlunya umat Islam memiliki seorang khalifah dan perlunya peran aktif umat Islam di Indonesia untuk kepentingan khilafah (Martin van Bruinessen, 1995: 129). Belum pernah dalam sejarahnya diadakan sebuah kongres agama Islam sedunia, kongres ini akan menjadi yang pertama. Oleh karena hal ini menjadi suatu kewajiban umat Islam maka utusan sangat perlu dikirim ke Kairo. Kemudian dia menegaskan bahwa sebagaimana yang diputuskan dalam kongres nasional Sarekat Islam beberapa waktu lalu, Sarekat Islam akan membantu dengan sekuat-kuat tenaga dan pikiran untuk perjuangan khilafah (Bandera Islam, 30 Oktober 1924).

Pertemuan ini juga membahas tentang konsep khilafah yang akan datang. Khalifah sejauh ini hanya mengurus urusan agama saja sedangkan sebenarnya harus memiliki kekuasaan dalam urusan agama dan dunia. Segala keperluan khalifah merupakan kewajiban semua umat Islam dan dalam al-Qur'an disebutkan bahwa khalifah harus ada. Perlu diadakan Majelis Khilafah dengan dikepalai oleh seorang ketua, dan ketua tersebut yang dinamakan khalifah, sedangkan anggota majelis tersebut haruslah diambil dari wakil umat Islam di masing-masing negeri. Kemudian diusulkan supaya khalifah berkududukan di Mekkah karena Mekkah adalah negerinya orang Islam sedunia. Kalau khalifah itu berkedudukan di salah satu tempat, Turki atau Mesir misalnya, tidak boleh tidak khalifah itu mesti mementingkan keperluan bangsanya sendiri daripada bangsa lain meskipun sesama umat Islam. Oleh karena itu siapa saja yang dipilih menjadi khalifah harus bertempat tinggal di Mekkah. Tentang siapa yang akan menjadi khalifah diputuskan untuk diselidiki bersama-sama dengan umat Islam yang lain saat di Kairo nanti (Bandera Islam, 30 Oktober 1924).

Sepanjang sejarah umat Islam Indonesia, pertemuan ini menjadi pertemuan khusus membahas khilafah yang pertama kali diadakan di Indonesia (Hindia Baroe,

16-18 Oktober 1924). Hasil penting dari pertemuan ini adalah kesepakatan bahwa keberadaan khilafah adalah wajib, kesediaan mereka untuk menghadiri Kongres Khilafah di Kairo, dan membentuk Komite Khilafah sebagai wadah perjuangan khilafah di Indoensia (*Bandera Islam*, 16 Oktober 1924). Setelah pertemuan ini, permasalahan khilafah menjadi agenda pembahasan Kongres Al-Islam.

Kongres Al-Islam ketiga atau yang dikenal Kongres Al-Islam Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 24-27 Desember 1924 di Surabaya. Kongres ini dihadiri oleh para ulama dan 68 organisasi Islam yang mewakili pimpinan pusat maupun cabang. Ada tiga keputusan yang dihasilkan dari kongres ini. Pertama, wajib hukumnya terlibat dalam perjuangan khilafah. Kedua, disepakati akan terus didirikan Komite Khilafah di seluruh Indonesia. Dan terakhir, diputuskan akan mengirimkan tiga orang utusan sebagai wakil umat Islam di Indonesia ke Kongres Kairo dengan enam butir mandat yang telah disepakati. Tiga orang utusan tersebut adalah Surjopranoto dari Sarekat Islam, Haji Fachruddin dari Muhammadiyah dan K. H. A. Wahab Hasbullah dari kalangan tradisional (*Bandera Islam*, 1 Januari 1925). Namun tidak lama setelah kongres tersebut, terdengar kabar bahwa Kongres Kairo ditunda satu tahun kedepan (*Bandera Islam*, 22 Januari 1925).

Masih pada awal 1925, Ibnu Sa'ud, penguasa Mekkah, mengumumkan niatnya untuk menyelenggarakan Kongres dunia Muslim di Mekkah. Sebelumnya, dalam perang Hijaz, Ibnu Saud berhasil mengusir Syarif Husein dari Mekkah. Setelah kemenangan itu, pemimpin Wahabi ini mulai melakukan pembersihan dalam kebiasaan praktek agama sesuai dengan ajarannya, walaupun ia tidak melarang pelajaran mazhab di Masjid al-Haram. Sebagian tindakan ini mendapat sambutan baik di Indonesia tetapi sebagian juga ditolak, terutama oleh golongan tradisional. Dengan kemenangan Ibnu Saud ini, baik Mekkah maupun Kairo berebut kedudukan khilafah (Deliar Noer, 1996: 243). Pada perkembangan selanjutnya Kongres Al-Islam lebih condong kepada kongres yang akan diadakan di Mekkah.

Undangan dari Ibnu Sa'ud tersebut menjadi topik pembicaraan dalam Kongres Al-Islam keempat di Yogyakarta dan kelima di Bandung. Kedua kongres ini didominasi oleh golongan pembaharu (Deliar Noer, 1996: 243). Pada Kongres keempat, friksi yang ada sebelumnya semakin muncul kepermukaan. K. H. Abdul Wahab, juru bicara golongan tradisional, mengusulkan kepada kongres untuk mengirim delegasinya ke Mekkah setelah Kongres Kairo untuk menjumpai Ibnu Saud supaya memberi toleransi mazhab dan praktek tradisional. Atas usulannya tersebut, K.H. Abdul Wahab

mendapatkan respon yang membuatnya kecewa. Banyak kalangan pembaharu segan datang untuk membela praktek keagamaan yang mereka sendiri menentang. Oleh sebab itu golongan tradisional merasa Kongres Al-Islam sudah tidak memiliki kegunaannya lagi untuk mereka (Martin van Bruinessen, 1995: 132).

K.H. Abdul Wahab selanjutnya mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat kalangan ulama golongan tradisional. Mereka bersepakat untuk mendirikan suatu panitia yang disebut Komite Hijaz. Komite ini kemudian diubah menjadi Nahdhatul Ulama (NU) di Surabaya tanggal 31 Januari 1926. Masalah Hijaz masih menjadi pokok pembicaraan utama. NU menekankan keterikatannya pada mazhab Syafi'i dan memutuskan untuk bersungguh-sungguh menjaga kebiasaan bermazhab di Mekkah dan di Indonesia. Selain itu mereka pun tidak menghalangi pihak yang tidak mau mengikuti mazhab Syafi'i (Deliar Noer, 1996: 243-244).

Kongres Al-Islam kelima diselenggarakan di Bandung pada Februari 1926, dengan tidak dihadiri oleh NU. Antusiasme golongan pembaharu kepada Ibnu Sa'ud pada kongres tidak berkurang. Kemudian kongres memilih delegasi baru yang terdiri dari Tjokroaminoto dan K.H. Mas Mansur (Darul Aqsha, tt: 56).

Kongres di Mekkah diadakan pada 1 Juni 1926. Selama kongres berlangsung, delegasi Indonesia ini tidak memberi kesan bagi peserta kongres yang lain dan tidak pernah angkat bicara. Bahkan Tjoroaminoto yang dikenal orator ulung di Indonesia tidak paham bahasa Arab (Martin van Brunessen, 1995: 134). Kongres Mekkah ini tidak menyinggung soal-soal politik untuk menghindari timbulnya masalah (Seratus Tahun Agus Salim, 1996: 15). Dalam surat kawat yang dikirim dari Mekkah, Tjokroaminoto menyatakan bahwa kongres yang diikutinya itu berusaha meningkatkan derajat umat Islam. Kongres juga membuat rumusan tata-tertib untuk kongres berikutnya (Aqib Suminto, 1996: 88). Oleh karena itu kongres gagal menuntaskan persoalan khilafah.

Sekembalinya ke tanah air, mereka disambut dengan Kongres Al-Islam keenam pada 23 September di Surabaya. Dalam kongres ini mereka menyampaikan laporan perjalanan mereka selama mengikuti kongres di Mekkah. Diputuskan pula dalam kongres ini untuk menggabungkan Kongres Al-Islam dengan Kongres Islam Sedunia di Mekkah sehingga menjadi cabang Hindia Timur. Nama Kongres Al-Islam kemudian diubah menjadi MAIHS (Mu'tamar al-'Alam al-Islami far' al-Hindiyya al-Syarqiyah), Kongres Al-Islam Sedunia cabang Hindia Timur (Martin van Bruinessen, 1995:134).

Kongres juga menetapkan Haji Agus Salim sebagai pimpinan MAIHS dengan kesekretariatan bertempat di Surabaya (Seratus Tahun Agus Salim, 1996:15).

Akan tetapi ironisnya, pengiriman delegasi ke Mekkah yang antara lain bertujuan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan persatuan dunia Islam justru telah membawa dampak yang tidak baik bagi persatuan umat Islam di Indonesia. Dampak yang pertama adalah retaknya hubungan antara golongan tradisional dan golongan pembaharu. Seperti yang telah diuraikan keretakan ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan golongan tradisional yang merasa aspirasi mereka tidak terwakili pada Kongres Al-Islam keempat dan kelima. Oleh karena merasa kecewa mereka keluar dari Kongres Al-Islam dan keanggotaan Komite Khilafah.

Dampak yang lain adalah merenggangnya hubungan diantara golongan pembaharu sendiri, yakni antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah. Kerenggangan hubungan ini awalnya terjadi karena adanya rumor mengenai pribadi Tjokroaminoto yang mengecewakan ulama Muhammadiyah selama di Mekkah. Pada saat Tjokroaminoto di Mekkah, beberapa tokoh Muhammadiyah berada di Mekkah pula untuk menunaikan ibadah haji. Ketika itu mereka kecewa melihat perilaku Tjokroaminoto, suatu hal yang tidak mereka duga terdapat pada pemimpin besar ini. Walaupun Kongres Al-Islam keenam menangkis tuduhan-tuduhan itu dan berharap agar hubungan antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah tidak terpengaruh olehnya, tetap saja kerenggangan hubungan keduanya tidak dapat dihindari (Deliar Noer, 1996: 155- 156).

Buntut dalam masalah tersebut adalah pemberlakuan disiplin partai oleh Sarekat Islam kepada Muhammadiyah. Pada Januari 1927 kongres Sarekat Islam di Pekalongan memutuskan untuk membolehkan cabang-cabang partai melakukan “disiplin” terhadap anggota Muhammadiyah bila tindakan tersebut disetujui pusat. Kongres juga memerintahkan pengurus eksekutif partai agar melarang para anggotanya menghadiri kongres Muhammadiyah yang akan dilaksanakan pada tahun itu juga. Puncak keretakan terjadi pada tahun 1929. Sarekat Islam mengambil tindakan disiplin umum terhadap Muhammadiyah (Deliar Noer, 1996: 257). Dengan demikian setiap anggota Sarekat Islam tidak boleh merangkap menjadi anggota Muhammadiyah. Mereka harus memilih salah satu antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah (Sustrisno Kutoyo, 1985:157).

Sarekat Islam kemudian berusaha memonopoli persoalan khilafah. Mereka mengklaim sebagai satu-satunya wakil umat Islam Indonesia dengan mengubah

MAIHS menjadi bagian dari partainya. Perubahan itu dilakukan meskipun tidak disetujui oleh Muhammadiyah (Deliar Noer, 1996:153). Oleh karena itu setelah perubahan ini periode Kongres Al-Islam selanjutnya eksklusif menjadi pertemuan Sarekat Islam saja.

Pada tahun 1927 berlangsung kongres kedua Mekkah, di mana dari Indonesia dihadiri oleh Haji Agus Salim. Oleh karena MAIHS sudah 'dimonopoli' oleh Sarekat Islam maka kepergian Haji Agus Salim ini pun atas nama Sarekat Islam dan tidak bisa dikatakan sebagai perwakilan umat Islam Indonesia secara umum. Kongres sendiri tidak berusaha menuntaskan masalah khilafah. Menurut Haji Agus Salim, Ibnu Saud tidak menginginkan masalah ini dibicarakan dalam kongres (Aqib Suminto, 1996: 89).

Demikianlah masalah khilafah menjadi semakin mereda. Baik kongres di Mekkah maupun di Kairo menutup pembicaraan masalah khilafah. Pertemuan Islam Internasional yang sering diselenggarakan pada periode selanjutnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan usaha menegakan khilafah. Hubungannya pertemuan-pertemuan tersebut dengan istilah PanIslamisme hanyalah dalam arti meningkatkan solidaritas sesama umat Islam bukan dalam arti untuk menegakan khilafah (Aqib Suminto, 1996: 90-91).

Begitupun di Indonesia, setelah friksi internal umat Islam semakin membesar, perjuangan khilafah yang semula menjadi "perjuangan bersama" akhirnya ditinggalkan. Sarekat Islam yang kemudian memonopoli masalah ini pun pada akhirnya meninggalkannya. Hal ini sejalan dengan sikap Sarekat Islam pada 1929 yang melepaskan Pan-Islamismenya dan berpihak pada nasionalisme Indonesia. Disamping itu, organisasi lain seperti Muhammadiyah dan NU memokuskan perjuangan mereka kepada urusan agama, pendidikan dan sosial (Martin van Bruinessen, 1995: 125)

2. Keterlibatan Sarekat Islam

Pada periode penyelenggaraan Kongres Al-Islam, Sarekat Islam memiliki perhatian lebih dalam bidang keagamaan dan politik Islam, baik politik Islam yang bersifat lokal maupun internasional. Hal ini tidak terlepas dari perubahan dasar partai yang terjadi pada periode sebelumnya.

Pada kongres Sarekat Islam Maret 1921 di Yogyakarta terjadi perubahan dasar partai. Kongres yang dihadiri oleh 57 Sarekat Islam lokal ini menyusun sebuah deklarasi baru tentang dasar partai oleh Semaun dan Haji Agus Salim (Takashi Shiraisi, 1997: 313). Meskipun begitu disebabkan pertikaian antara keduanya, rencana dasar-

dasar tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu hasil bersama. Dasar-dasar tersebut lebih mencerminkan pemikiran Haji Agus Salim daripada pemikiran Semaun. Dalam dasar partai yang disepakati, kedudukan Islam dijelaskan dengan lebih luas. Islam diartikan sebagai asas bagi kemerdekaan yang sesungguhnya, melepaskan seluruh rakyat dari segala macam penghambaan. Dengan pandangan seperti ini ditegaskan bahwa kebijakan dan kegiatan-kegiatan Sarekat Islam benar-benar semata-mata berdasar Islam (Deliar Noer, 1996: 146).

Pandangan tersebutlah yang mendorong Sarekat Islam berperan dalam Kongres Al-Islam. Ditambah juga pandangannya tentang persatuan yang berasaskan Islam, mendorong Sarekat Islam merespon masalah khilafah. Dengan demikian adalah lumrah melihat Sarekat Islam berperan penting dalam setiap pelaksanaan Kongres Al-Islam. Dengan demikian, Islam yang menjadi dasar partai menjadi alasan mengapa Sarekat Islam ikut campur dalam Kongres Al-Islam sekaligus merespon permasalahan khilafah.

Selama beberapa tahun Sarekat Islam menjadi organisasi yang memperjuangkan Pan-Islamisme di Indonesia. Bagi mereka, perjuangan khilafah itu penting untuk mewujudkan cita-cita Pan-Islamisme yakni persatuan umat Islam seluruh dunia di bawah peraturan hidup Islam. Seperti yang dipahami Tjokroaminoto, Pan-Islamisme adalah sedalam-dalamnya persatuan di antara umat Islam yang sudah nabi Muhammad saw. contohkan. Persatuan itu tidak hanya untuk umat Islam di Indonesia tetapi untuk seluruh umat Islam di dunia di bawah suatu peraturan hidup Islam. Tidaklah cita-cita ini menjadi kenyataan kecuali jika Pan-Islamisme ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (*Bandera Islam*, 14 Desember 1924).

Untuk beberapa tahun Sarekat Islam tetap teguh dengan pandangan ini. Namun setelah antusiasme Kairo dan Mekkah terhadap permasalahan khilafah menghilang, Sarekat Islam pun meninggalkan perjuangan khilafah. Kemudian mereka mengalihkan perjuangan Islam internasional mereka tersebut ke perjuangan dalam konteks kebangsaan.

Respon sekaligus keterlibatan Sarekat Islam dalam masalah khilafah sudah tergambar sejak kongres kesebelas Sarekat Islam pada Agustus 1924. Kongres yang diselenggarakan di Surabaya ini membahas undangan dari ulama Al-Azhar untuk seruan Kongres Kairo dan memutuskan bahwa Sarekat Islam akan membantu dengan segala kemampuan untuk mengirim utusan dari Indonesia ke Kongres Kairo (*Bandera Islam*, 16 Oktober 1924). Selain membahas soal undangan, kongres ini juga

menghasilkan keputusan lain yang sangat berperan bagi perjuangan khilafah yakni komitmen Sarekat Islam untuk menerbitkan surat kabar baru yang diberi nama *Bandera Islam*. Surat kabar ini merupakan surat kabar resmi Sarekat Islam yang berdasarkan politik Islam. Dalam terbitannya, *Bandera Islam* banyak memuat pandangan Sarekat Islam tentang politik Islam serta permasalahan umat Islam, baik lokal maupun internasional, termasuk permasalahan khilafah.

3. *Bandera Islam dan Sarekat Islam.*

Pada awal abad ke-20, pers di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Kemajuannya sejalan dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan. Berkembangnya organisasi pergerakan turut andil memajukan pers pribumi. Banyak surat kabar lahir sebagai organ dari organisasi pergerakan. Pada periode yang dikenal dengan zaman pergerakan ini antara pers yang dikelola oleh golongan pribumi dan organisasi pergerakan bagaikan kembar siam. Saat itu keduanya merupakan dua kegiatan bangsa Indonesia yang hidup berdampingan. Sedikitnya ada 36 surat kabar yang diterbitkan oleh kaum pergerakan. Jumlah ini cukup banyak jika dibandingkan dengan jumlah surat kabar Belanda yang waktu itu sebanyak 28 (M. Gani, tt: 39-40).

Para tokoh pergerakan tetap mengadakan perkumpulan atau rapat besar sebagai cara untuk berkomunikasi, namun hal itu masih terbatas, sedangkan forum yang tersedia oleh media massa atau pers adalah kontinyu dan intensif, sehingga aspirasi mereka dapat terkomunikasikan lebih efektif. Pers telah membuat revolusi komunikasi, antara lain mengubah pola komunikasi tradisional yang terutama lisan sifatnya menjadi tertulis. Pers juga menciptakan sistem komunikasi terbuka, dimana informasi dapat diperoleh oleh golongan sosial manapun. Meskipun komunikasi lewat pers bersifat satu arah, pers mempunyai potensi membangkitkan kesadaran kolektif, antara lain mengenai kepentingan umum, seperti keamanan, kesejahteraan, kemasyarakatan, ketatanegaraan dan lain sebagainya. Menurut Sartono Kartodirdjo, saat itu pers sangat membantu tumbuhnya massa kritis dalam masyarakat, kesadaran kolektif, dan solidaritas umum. Dengan kata lain pers mempunyai peranan penting untuk menjalankan pendidikan politik bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu dunia pers mendapat perhatian yang besar dari golongan pergerakan (Sartono Kartodirdjo, 1992: 112-119).

Sebagai organisasi pribumi yang bergerak memajukan kehidupan pribumi, Sarekat Islam juga memberi perhatian terhadap dunia pers. Sepanjang organisasi ini

berdiri, telah banyak surat kabar yang diterbitkan. Para penggerak Sarekat Islam menyadari efektifitas surat kabar untuk mewujudkan tujuan organisasi mereka. Usaha penerbitan surat kabar sudah dimulai sejak awal-awal organisasi ini berdiri hingga kemudian pada 1924 Sarekat Islam menerbitkan surat kabar Bandera Islam.

Sarotomo merupakan surat kabar pertama yang diterbitkan oleh Sarekat Islam pada tahun-tahun awal. Surat kabar ini terbit tahun 1916 di Surakarta. Para pemimpin Sarekat Islam kemudian bergerak agresif untuk mendapatkan dukungan pers di kota-kota besar. Pada 1 Januari 1913 harian Oetoesan Hindia mulai terbit sebagai organ resmi Sarekat Islam, sedangkan nomor contohnya beredar pada 5 Desember 1912 (Ahmat Adam, 2003: 295). Sarekat Islam juga kemudian menerbitkan antara lain Sinar Djawa di Semarang, Kaoem Moeda di Bandung dan Pantjara Warta di Batavia. Seluruhnya secara de facto menjadi organ Sarekat Islam (Takashi Shiraishi, 1997: 66).

Awal 1920-an menjadi periode dimana Sarekat Islam menegaskan Islam dan persatuan Islam sebagai dasar dan tujuan partai. Pada kondisi seperti ini kebutuhan Sarekat Islam akan surat kabar untuk menunjukkan identitasnya sebagai sebuah partai Islam merupakan sesuatu yang lumrah. Kebutuhan tersebut juga ditunjukkan untuk menyuarakan pandangan-pandangan keislamannya. Bertolak dari hal itu, pada Agustus 1924 dalam kongres nasional Sarekat Islam yang kesebelas diputuskan untuk menerbitkan sebuah surat kabar baru yang menjadi organ resmi Sarekat Islam. Kongres memutuskan untuk menerbitkan surat kabar dengan nama Bandera Islam di Yogyakarta.

Bandera Islam adalah surat kabar berbahasa melayu yang berdasarkan politik Islam dan terbit sejak 1924 hingga 1927. Selama terbitannya selalu dibentangkan ilmu-ilmu keislaman dan pandangan-pandangan politik para pemimpin Sarekat Islam. Penerbitan Bandera Islam dilatarbelakangi oleh keinginan Sarekat Islam untuk menghidupkan keislaman di Indonesia. Menurut pandangan Sarekat Islam paham komunis telah mengacaukan pandangan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk menyegarkan kembali pemahaman Islam di Indonesia (Bandera Islam, 5 September 1924).

Diterbitkan oleh Komite Bandera Islam Djogjakarta yang terdiri dari anggota Sarekat Islam Yogyakarta. Surat kabar ini dikelola oleh para pemimpin Sarekat Islam seperti Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Sjahbuddin Latif. Pertama kali terbit dengan edisi percontohan pada 5 September 1924 sedangkan edisi pertama terbit pada 2

Oktober 1924. Setiap kali terbit berjumlah empat halaman. Mulanya terbit setiap hari Kamis dan pada perkembangan berikutnya terbit setiap Senin dan Kamis.

Harga langganan *Bandera Islam* sebesar f. 1.50/3 bulan untuk wilayah Indonesia dan f. 1.75/3 bulan untuk di luar Indonesia. Tidak didapat keterangan berapa jumlah (oplah) *Bandera Islam* setiap kali terbit. Akan tetapi sejak edisi 12 Februari 1925 dapat diketahui bahwa surat kabar ini mempunyai oplah yang cukup besar dan sirkulasinya tidak hanya di Indonesia tetapi juga menjangkau hingga mancanegara, seperti London, Lahore, Madras dan Bengal. Luasnya jangkauan ini tidak mengherankan sebab pengaruh Sarekat Islam telah sampai hingga mancanegara. Selain berasal dari uang langganan ongkos penerbitan didukung oleh biaya iklan sebesar f. 0.15/baris dengan minimal f. 2.00 untuk sekali muat.

Dalam perkembangannya, *Bandera Islam* mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Beberapa surat datang kepada redaksi *Bandera Islam* menyatakan harapan agar *Bandera Islam* dapat terbit setiap hari atau setidaknya tiga kali dalam sepekan. Namun karena alasan keuangan yang belum mendukung, redaksi *Bandera Islam* belum mampu memenuhi harapan tersebut (*Bandera Islam*, 26 Maret 1926). Meski begitu harapan tersebut sedikit terpenuhi. Sebab, mulai 1 Mei 1925 *Bandera Islam* terbit menjadi dua kali dalam seminggu, yakni setiap Senin dan Kamis, dengan harga menjadi f. 3 per kwartal.

Edisi 16 Februari 1926 merupakan edisi terakhir terbit di Yogyakarta dan sejak 3 April 1926 hingga edisi terakhir *Bandera Islam* terbit di Bandung melalui percetakan Fajar Hindia. Di kota Bandung ini tampilan *Bandera Islam* mengalami perubahan. Sejak 7 Februari 1927 terbitan *Bandera Islam* dibagi menjadi dua. Bagian pertama masih seperti semula yakni berisikan seputar keislaman. Bagian ini dikelola oleh H.O.S. Tjokroaminoto, H. A. Salim, Ir. Soekarno, dan Sj. Latif. Sedangkan pada bagian kedua berisikan seputar pergerakan nasional dan dikelola oleh Mr. Sartono dan Ir. Soekarno. Selain itu pada masa-masa akhir terbitannya, *Bandera Islam* banyak membahas gagasan Pan Asia.

Bandera Islam hanya mampu bertahan selama tiga tahun. Dalam edisi yang terakhir dijelaskan bahwa disebabkan kepindahan redaksi ke Jakarta maka edisi 24 Oktober 1927 menjadi edisi terakhir *Bandera Islam*. Setelah berpindah tempat para pemimpin redaksi akan menerbitkan kembali surat kabar dengan rupa dan nama yang berbeda (*Bandera Islam*, 24 Oktober 1927). Dalam perkembangan selanjutnya pada

November di tahun yang sama, para pemimpin Sarekat Islam kemudian menerbitkan surat kabar baru yang bernama Fadjar Asia.

4. Peran Bandera Islam dalam Perjuangan Khilafah.

Bandera Islam dikenal dengan surat kabar yang mendukung gerakan Pan-Islamisme. Dalam terbitannya digunakan jargon Organ ini tersedia bagi Pergerakan Pan-Islamisme. Hal tersebut muncul seiring dengan menguatnya perhatian Sarekat Islam kepada Pan-Islamisme. Sebagai surat kabar Sarekat Islam, Bandera Islam selalu memiliki pandangan yang sejalan dengan Sarekat Islam. Periode Sarekat Islam terlibat dalam perjuangan khilafah bersamaan dengan periode terbitnya Bandera Islam. Oleh karena itu surat kabar ini terutama digunakan oleh Sarekat Islam sebagai media massa untuk perjuangan khilafah di Indonesia.

Para pemimpin Sarekat Islam menggunakan Bandera Islam sebagai media untuk mempropagandakan perjuangan khilafah. Usaha propaganda tersebut dilakukan dengan cara menuliskan pandangan mereka tentang urgensi perjuangan khilafah, dan meliput aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan dalam perjuangan ini. Tak jarang propaganda tersebut juga dilakukan dengan cara memberitakan perkembangan dunia Islam khususnya di Timur Tengah.

Dalam terbitan Bandera Islam banyak dimuat gagasan perjuangan khilafah dan usahausaha yang dilakukan dalam perjuangan khilafah. Selain itu Bandera Islam memiliki seirkulasi yang luas. Semangat perjuangan khilafah dapat merata di seluruh Hindia Belanda karena ada peran surat kabar berbahasa melayu yang menyuarakan perjuangan tersebut. Bandera Islam mampu menjembatani hubungan komunikasi politik antara pergerakan pusat di Jawa dengan pergerakan di wilayah lain di Indonesia. Distribusi informasi dapat tersalurkan ke seluruh lapisan masyarakat yang bertempat tinggal di berbagai tempat. Ini merupakan sebuah usaha untuk mempropagandakan perjuangan khilafah ke seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan begitu perjuangan khilafah dapat tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi sebuah kesatuan yang berpusat di Jawa.

Terbitan Bandera Islam sering memuat reportase perjuangan khilafah baik di Indonesia maupun di dunia Islam yang lain. Usaha tambahan yang dilakukan juga untuk memahamkan masyarakat tentang perjuangan ini, Bandera Islam sering memuat artikel yang membahas tentang Sejarah Islam, Politik Islam, Khilafah Islamiah juga berita-berita baik dari Indonesia maupun dunia Islam yang lain. Berita-berita

tersebut sering dikaitkan dengan perjuangan khilafah. Pada periode ini perjuangan khilafah menjadi sebuah perjuangan yang membumi dan menasional di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui Bendera Islam para pemimpin Sarekat Islam berusaha memahamkan perjuangan khilafah ini kepada seluruh lapisan masyarakat. Usaha ini tidak hanya tertuju kepada anggota Sarekat Islam saja, tokoh pergerakan, ulama maupun rakyat pada umumnya pun akhirnya terpahamkan. Hal ini dapat terlihat dari antusiasme masyarakat di berbagai tempat. Meskipun begitu usaha Sarekat Islam ini tidak selalu mendapatkan respon positif.

Respon masyarakat terhadap peran Bendera Islam pun beragam. Sikap pesimis dan ketidaksetujuan pada perjuangan khilafah muncul juga di tengah masyarakat. Untuk menjaga opini perjuangan khilafah dari suara-suara pihak yang kontra, para pemimpin Sarekat Islam menggunakan Bendera Islam sebagai media untuk berpolemik. Melalui Bendera Islam mereka merobohkan setiap argumentasi kalangan yang kontra. Oleh karena itu Bendera Islam memiliki peran yang besar bagi perjuangan khilafah.

D. SIMPULAN

Setelah menelusuri dinamika umat Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-20 terlihat bahwa perjuangan khilafah pernah ada di Indonesia dan merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Tidak lama setelah Khilafah Turki Usmani diruntuhkan, sudah banyak orang Indonesia terlibat dalam perjuangan ini. Penelusuran sumber-sumber sejarah yang ada menunjukkan bahwa di Indonesia para ulama, tokoh pergerakan Islam, beserta umat Islam yang lain turut serta memperjuangkan khilafah agar tegak kembali. Mereka merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaian untuk membentuk suatu khilafah baru.

Sarekat Islam adalah salah satu kelompok yang terlibat dalam perjuangan khilafah. Perannya sangat signifikan di Indonesia. Saat itu Sarekat Islam mengklaim sebagai organisasi yang berjuang untuk mewujudkan cita-cita Pan-Islamisme. Pelaksanaan kongres-kongres AllIslam menjadi mimbar bagi Sarekat Islam untuk memperluas pengaruh Pan-Islamisme. Usaha ini telah Sarekat Islam lakukan sejak Kongres Al-Islam pertama. Untuk beberapa tahun usaha tersebut terus berlanjut bahkan intensitasnya semakin bertambah saat mereka terlibat dalam perjuangan khilafah. Oleh karena itu

keterlibatan Sarekat Islam dalam perjuangan khilafah sejalan dengan antusiasme mereka kepada Pan-Islamisme.

Dalam pandangan Sarekat Islam perjuangan khilafah menjadi penting bagi perjuangan Islam karena menuju langkah awal untuk mewujudkan cita-cita Pan-Islamisme. Cita-cita persatuan umat Islam sedunia dalam peraturan hidup Islam dibawah pemerintahan yang merdeka ini merupakan sebuah cita-cita yang mulia yang saat itu mereka perjuangkan. Sebagaimana yang mereka pahami Islam merupakan suatu peraturan hidup yang lengkap yang mengikat dan menyatukan seluruh umat Islam di dunia. Dengan tegaknya khilafah maka citacita tersebut dapat terwujud.

Persoalan khilafah menjadi tema yang selalu dibahas dalam Kongres Al-Islam pada periode ini. Sebab, selain karena ide perjuangan khilafah yang mudah diterima, Sarekat Islam menjadi pihak yang paling dominan dalam setiap pelaksanaan Kongres Al-Islam, dan mereka memiliki pengikut yang cukup banyak ditambah para pemimpin mereka yang berpengalaman lebih dalam hal organisasi. Begitu seterusnya hingga mereka kemudian melepaskan Pan-Islamismenya dan berpihak pada nasionalisme Indonesia, dan di waktu yang bersamaan mereka terjerat dalam perselisihan internal umat Islam

Pada perkembangan selanjutnya permasalahan khilafah ini ditinggalkan oleh umat Islam di Indonesia. Penyebabnya karena baik golongan tradisional yang terhimpun dalam NU maupun golongan pembaharu seperti Muhammadiyah dan Al-Irsyad, memfokuskan perjuangan mereka ke urusan agama, sosial, dan pendidikan. Sementara itu Sarekat Islam sudah tidak berkharismatik lagi dihadapan mereka setelah Sarekat Islam justru ikut terjerat dalam perseteruan internal umat Islam. Sejak saat itu perjuangan Sarekat Islam sudah tidak lagi mewakili aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Mereka juga tidak bisa mengklaim lagi sebagai pelopor gerakan nasional setelah ada PNI yang menggantikan posisi mereka. Selain itu sokongan dunia Islam terhadap persoalan khilafah yang menghilang mengakibatkan Sarekat Islam meninggalkan perjuangan khilafah dan mengalihkannya pada perjuangan Islam dalam konteks kebangsaan.

Bandera Islam adalah surat kabar yang diterbitkan oleh Sarekat Islam. Kemunculannya dilatarbelakangi oleh keinginan Sarekat Islam untuk menghidupkan keislaman (Pan-Islamisme) di Indonesia. Sebagai surat kabar yang dikeluarkan Sarekat Islam, Bendera Islam selalu memuat pandangan politik dan keislaman Sarekat Islam. Redaktornya pun adalah para pengurus Sarekat Islam. Oleh karena itu Bendera Islam selalu sejalan dengan Sarekat Islam.

Pada masa itu usaha penerbitan surat kabar merupakan cara yang biasa dilakukan oleh organisasi-organisasi pergerakan. Surat kabar merupakan cara yang efektif bagi organisasi pergerakan untuk menyosialisasikan pandangan mereka. Antara Sarekat Islam dengan *Bandera Islam* diibaratkan sebagai kembar siam. Keduanya hidup secara berdampingan. Terbitan *Bandera Islam* mencerminkan perjuangan Sarekat Islam. Jadi wajar jika ditemukan banyak tulisan tentang khilafah dalam *Bandera Islam*. Sebab, periode *Bandera Islam* terbit berbarengan dengan keterlibatan Sarekat Islam dalam perjuangan khilafah.

Bandera Islam mempunyai sidang pembaca yang luas, peredarannya tidak hanya di Indonesia bahkan menjangkau hingga mancanegara. Oleh karenanya *Bandera Islam* menjadi media yang sangat efektif bagi Sarekat Islam untuk memperluas propaganda mereka. *Bandera Islam* turut membantu mendistribusikan informasi perjuangan khilafah di Indonesia. Dalam setiap pelaksanaan Kongres Al-Islam, *Bandera Islam* turut berperan dalam menyebarkan informasi kongres. Undangan, pemberitahuan, reportase serta hasil keputusan kongres banyak dimuat dalam *Bandera Islam*. Para pemimpin Sarekat Islam berulang kali melakukan hal itu. Mereka menyadari adanya respon positif dari masyarakat kepada *Bandera Islam*.

Saat itu pun perbedaan pendapat mengenai perjuangan khilafah telah ada. Polemik yang dilakukan para pemimpin Sarekat Islam melalui *Bandera Islam* menunjukkan hal tersebut. Tidak semua masyarakat selalu memiliki pendapat yang sama. Ada saja pihak yang berseberangan dengan Sarekat Islam dan *Bandera Islam*. Jadi pada saat itu masyarakat yang merespon terbitan *Bandera Islam* terbagi menjadi dua yakni ada yang pro dan ada yang kontra.

Di masa lalu *Bandera Islam* sangat berguna bagi Sarekat Islam untuk perjuangan khilafah, namun tidak ada gunanya lagi bagi mereka ketika sejarah *Bandera Islam* ini ditulis. Oleh karenanya memahami sejarah bukan untuk kepentingan orang-orang di masa lalu tetapi untuk kepentingan orang-orang di masa kini. Jika dulu lembaran-lembaran *Bandera Islam* telah menjadi alat propaganda yang efektif untuk perjuangan khilafah, maka hari ini lembaran-lembarannya yang masih ada menjadi jendela yang efektif untuk memahami antusiasme para pendahulu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan khilafah. Dengan begitu dapat memperluas wawasan tentang perjuangan khilafah yang hari ini banyak diperbincangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Surat Kabar

Bandera Islam

Hindia Baroe

Jurnal

Martin van Bruinessen, "Muslim of the Dutch East Indies and The Caliphate Question",
Studia Islamika, Vol 2, No. 3, 1995, hlm. 115-140.

Buku

Adam, Ahmat. Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesian. Jakarta:
Hasta Mirta, 2003.

Aqsha, Darul. Kiai Haji Mas Mansur (1986-1946) Perjuangan dan Pemikiran. Jakarta:
Erlanga, tanpa tahun.

Anwar, Tiar Bachtiar. Lajur-lajur Pemikiran: Kilasan Pergulatan Intelektual Islam
Indonesia. Depok: Komunitas Nuun, 2011.

Gani, M.. Surat Kabar Indonesia pada Tiga Zaman, Jakarta: Departemen Penerangan,
1978.

Iskandar, Mohammad. Para Pengemban Amanah Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama
di Jawa Barat, 1900-1950. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2001.

Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional
dari Kolonialisme sampai Nasionalisme. Jakarta: Gramedia, 1992.

Korver, A.P.E.. Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?. Jakarta: Grafitipers, 1985.

Kutoyo, Sutrisno. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jakarta: Depdikbud, 1985.

Noer, Deliar. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1901-1942. Jakarta: LP3ES, 1996.

Shiraishi, Takashi. Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912-1926. Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Suminto, Aqib. Politik Islam Hindia Belanda. Jakarta: LP3ES, 1996.

Syukri, Ahmad. Merekam Jejak Nasionalisme dalam Islam. Jakarta: Hayfapers, 2007.

tk. Seratus Tahun Agus Salim. Jakarta: Sinar Harapan, 1996.

Utomo, Cahyo Budi. Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia dari Kebangkitan
hingga Kemerdekaan. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.

Wahid, Abdurrahman. (Ed.). Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional
di Indonesia. Jakarta: Wahid Institute, 2009.

Zurcher, Erik J.. Sejarah Modern Turki. Jakarta: Gramedia, 2003.